



## Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan (Studi pada KSPPS BMT Artha Buana Metro)

Ahmad Muslimin<sup>1</sup>, Fuad Ashari<sup>1</sup>, Didik Kusno Aji<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Lampung, Indonesia

 [fuad1pmii@gmail.com](mailto:fuad1pmii@gmail.com)\*

### Abstract

This research aims to determine the Sharia financial inclusion program at KSPPS BMT Artha Buana Metro to increase the empowerment of MSMEs. The research method used in this research is qualitative with a phenomenological approach. This research indicates that KSPPS BMT Artha Buana Metro has implemented Sharia financial inclusion well. This research also shows that social capital is vital in implementing financial inclusion. Good social capital is defined by several indicators: ease of access, ability to use, suitability to needs, training and supervision. KSPPS BMT Artha Buana Metro has provided many products and facilities so that MSMEs can obtain capital and use it to develop their business and improve the overall sustainable economy. In summary, the findings of this research accentuate the importance of well-implemented Sharia financial inclusion programs, driven by robust social capital, in promoting the empowerment of MSMEs and fostering a resilient and sustainable economy.

**Keywords:** Sharia Financial Inclusion, Empowerment MSMEs, Financial Inclusion Program

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

June 03, 2021

Revised

July 28, 2021

Accepted

August 09,

2021

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini berkembang dengan pesat, sehingga berdampak pada banyaknya kebutuhan dalam segala sektor, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini mendorong perlunya akses keuangan yang memadai dan dapat di akses oleh seluruh kalangan Masyarakat, atau dengan kata lain, diperlukan adanya sistem keuangan yang terbuka atau inklusi. Inklusi keuangan merupakan suatu proses yang mengacu pada mudahnya akses, ketersediaan serta penggunaan sistem keuangan formal, seperti layanan perbankan untuk semua orang (Laili & Kusumaningtias, 2020). Inklusi keuangan akhir-akhir ini menarik perhatian di banyak Negara. Kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan diakui secara luas oleh kalangan pelaku keuangan di dunia, bahkan inklusi keuangan sendiri telah dipakai sebagai fokus utama dalam mengambil kebijakan pemerintah di beberapa negara sejak tahun 2000-an.

Berdasarkan rilis Survei Nasional literasi dan Inklusi Keuangan dari otoritas jasa keuangan (OJK) pada November 2019. Dimana dalam survey tersebut menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia memiliki indeks literasi keuangan yang bervariasi. Dimana masyarakat perkotaan memiliki indeks sebesar 41, 41%. Sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 83, 60%. Sedangkan indeks literasi keuangan masyarakat pedesaan sebesar 34, 53% dan indeks inklusi keuangan sebesar 68, 49%. Sedangkan secara nasional, indeks inklusi keuangan pada tahun 2019 sebesar 38, 03% sedangkan angka

indeks inklusi keuangan sebesar 76, 19% (Agung Budi, 2022). Sedangkan jika dibandingkan dengan Negara Asean, seperti Singapura, indeks inklusi keuangan sebesar 98%, Malaysia 85% dan Thailand 82% (Agung Budi, 2022). Ini menandakan, bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di Negara-negara Asean.

Untuk mencapai ketertinggal tersebut, pada tahun 2019, juga pemerintah meluncurkan berbagai program. Antara lain: program layanan keuangan digital (LKD), dan laku pandai atau layanan keuangan tanpa cabang. DK adalah kegiatan layanan jasa system pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi, seperti: mobil based maupun wab based, dan jasa pihak ketiga. Sementara laku pandai atau layanan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif adaah program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melaui kerjasama dengan pihak bank dengan dukungan teknologi (Sastiono & Nuryakin, 2019).

Inklusi keuangan merupakan komponen penting dalam rangka mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi dan pola sosio ekonomi yang berkembang saat ini. Sistem layanan keuangan inklusif sejatinya merupakan ikhtiar untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengakomodasi kalangan berada, namun juga memihak kalangan berpenghasilan rendah dan miskin (Nengsih, 2023). Inklusi keuangan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan kelompok Masyarakat baik yang berada pada perkotaan terlebih masyarakat desa agar memiliki akses yang memadai pada layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau. Ini mencakup akses rekening bank, produk serta layanan bank, kredit mikro, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Adanya program inklusi keungan tentu akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi secara merata (Lestari et al., 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit di jangkau (Iko Putri Yanti, 2019). Tak terkecuali masyarakat desa, yang notabennya berjauhan dari kantor layanan keuangan. Pelaksanaan inklusi keuangan juga beriringan dengan literasi keuangan. Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) seseorang dikatakan *well literate* apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan layanan keuangan serta mengetahui fitur, manfaat dan risiko layanan keuangan. Masyarakat yang *well literate* cenderung memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan untuk mendukung kesejahteraanannya. Terciptanya masyarakat yang *well literate* dan *financially inclusive* diharapkan pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi. Dengan berkembangnya literasi keungan pada masyarakat, hal ini berdampak pada munculnya pemahaman tentang produk-produk serta layanan keuangan yang dapat di akses oleh masyarakat. Inklusi keuangan merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat *in the bottom of pyramid* dalam menggunakan jasa keuangan. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mempermudah akses layanan perbankan untuk masyarakat. Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perberdayaan yang berkelanjutan pada masyarakat desa. Besarnya akses, kemampuan, kesesuaian serta dampak sosial ekonomi yang terjadi setelah menggunakan jasa keuangan digunakan sebagai indikator inklusi keuangan. Rendahnya akses masyarakat Indonesia terhadap produk/jasa layanan keuangan akses dapat tergambar melalui data Global Findex World Bank tahun 2014, di mana jumlah masyarakat dewasa Indonesia yang sudah memiliki rekening di lembaga keuangan (*banked people*) baru mencapai 36% dari total penduduk dewasa (Devi et al., 2021). Secara global, ada 2 miliar penduduk dewasa di dunia yang

belum memiliki rekening. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya akses keuangan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Dengan adanya akses keuangan yang terbuka tersebut, Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh serta menjangkau akses keuangan dalam rangka pemenuhan permodalan maupun akses keuangan lainnya. Menurut beberapa penelitian, lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam menyalurkan permodalan terhadap UMKM yang dilakukan oleh masyarakat sekaligus sebagai wujud pemberdayaan (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Dengan kata lain, perbankan syariah serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi perbankan yang memiliki potensi dalam melakukan percepatan inklusi keuangan syariah.

Namun, jika dilihat dari pola operasional yang dilakukan oleh perbankan, akan ditemukan beberapa hambatan terkait proses penyaluran permodalan terhadap UMKM, dimana UMKM memerlukan permodalan yang tidak terlalu besar dan persyaratan yang sederhana, dimana perbankan syariah memiliki regulasi yang mengikat dan tidak efektif jika harus menjangkau UMKM yang jumlahnya banyak (Laili & Kusumaningtias, 2020). Salah satu solusi mengatasi hal tersebut, yaitu seperti yang terdapat di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya berfokus pada masyarakat kecil dan menengah serta pada usaha mikro agar dapat mengakses permodalan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang muncul dari peran aktif masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan juga menjalankan fungsi sosial untuk mensejahterakan Masyarakat (Laili & Kusumaningtias, 2020). Didukung dengan fokus BMT sebagai perpanjangan tangan dari lembaga perbankan untuk dapat menyalurkan pendanaan kepada masyarakat yang unbankable. Peran BMT sebagai penyalur sekaligus akses permodalan bagi UMKM dapat dikatakan memiliki respon positif. Kepercayaan yang didapat antara anggota layanan dan BMT dapat dilihat dari dana yang telah dipercayakan BMT kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Hal itu ditunjukkan oleh BMT Artha Buana Metro yang telah berdiri sejak tahun 2015 silam, dimana terdapat kantor layanan berjumlah 5 kantor dengan anggota layanan lebih dari 2000 orang. Volume pembiayaan yang telah di salurkan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro sejak berdiri sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel.1 Volume Pembiayaan**

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1	2020	14.574.437.155
2	2021	17.753.055.157
3	2022	21.112.631.663

Berdasarkan data di atas, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun volume jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro kepada masyarakat dan UMKM, oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana program inklusi keuangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Artha Buana ini berjalan optimal, dan melihat seberapa dampak pada keberlanjutan UMKM. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi inklusi keuangan yang telah diterapkan oleh BMT Syariah Riyal telah berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan layanan pemasarannya (Siti et al., 2023). Hal tersebut menarik bagi penulis untuk mengetahui tingkat efektivitas inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM dan juga melakukan penelitian pada KSPPS BMT Artha Buana Metro guna untuk melihat tingkat penyaluran permodalan pada UMKM serta melihat efektivitas inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini bisa berguna dalam menambah referensi terutama terkait dengan inklusi keuangan syariah khususnya. Selain itu, tulisan ini diharapkan menjadi evaluasi bagi KSPPS BMT Arta Buana dalam inklusi keuangan

syariah yang di jalankan. Apakah inklusi keuangan yang dijalankan bisa di rasakan oleh semua masyarakat khususnya UMKM?

## **METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif digunakan ketika ingin meneliti suatu objek secara apa adanya dan tidak ada manipulasi sehingga keadaan objek akan tetap sama dari peneliti masuk hingga selesai meneliti objek tersebut (Sugiyono, 2009). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni bertujuan untuk menggali informasi dari orang yang telah mengalami kejadian atau pengalaman individu terkait suatu hal. Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi tersebut adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran program inklusi keuangan syariah yang dijalankan oleh BMT Artha Buana Metro serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan UMKM setelah mendapatkan permodalan dari pihak BMT. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS BMT Artha Buana Metro yang beralamatkan di Jalan RA Kartini Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan beberapa UMKM yang mendapatkan permodalan dari pihak BMT. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yakni selama bulan agustus tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada inklusi keuangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro serta efek yang dirasakan oleh UMKM yang telah mendapatkan permodalan dari pihak BMT. Sumber data yang peneliti digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang bersumbert dari hasil observasi secara langsung termasuk wawancara. Data sekunder berupa data yang tidak secara langsung diperoleh peneliti atau berupa dokumen,

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang dianggap penting danb sesuai oleh penilis. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada KSPPS BMT Artha Buana Metro serta pada UMKM yang telah mendapatkan permodalan dari pihak BMT. Informan yang menjadi narasumber Manager Umum BMT Artha Buana Metro yaitu Ibu Rini, Manager Cabang Mulyojati BMT Artha Buana Metro yaitu Bapak Zaki dan Bapak Agus yang merupakan UMKM yang menjadi anggota layanan dari BMT Atha Buana Metro.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Teknik wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk membantu mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada narasumber. Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan yaitu dengan studi dokumen seperti catatan tentang suatu peristiwa.

Pengujian validitas data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan dari berbagai sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan pengecekan data menggunakan cara atau teknik yang berbeda dalam perolehannya. Triangulasi waktu yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dalam waktu yang berbeda.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (Miles & Huberman, 2016). Analisis data dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung sampai dengan selesai. Langkah- langkah dalam analisis data dilakukan dengan mereduksi data yaitu meringkas hal-hal pokok dari hasil wawancara yang menjadi fokus penelitian. Hal pokok dari hasil penelitian mencakup program inklusi keuangan syariah dan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh KSPSS BMT Artha Buana Metro. Gambaran pokok yang telah diperoleh akan menjadi pusat perhatian peneliti selanjutnya agar dapat memudahkan dalam pengumpulan data. Langkah kedua setelah melakukan reduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan program inklusi keuangan syariah dengan melihat akses yang diberikan, penggunaan dan kesesuaian yang dikaitkan dengan modal sosial. Pemberdayaan UMKM dilihat dari kondisi UMKM setelah mendapatkan permodalan yang dapat meliputi bertambahnya produk,

tenaga kerja maupun pengetahuan yang didapat dari pelatihan yang biasanya tersedia. Penyajian data yang telah dilakukan dapat memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan terkait efektivitas program inklusi keuangan syariah. Efektif dimaksudkan dengan kesesuaian program dan hasil yang diperoleh dari inklusi keuangan syariah. Langkah selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi serta melakukan verifikasi informasi yang telah diperoleh kepada narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mall wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak aktif dalam menjalankan usaha pada sektor keuangan dengan pola jemput bola. Selain itu, dalam menjalankan usahanya KSPPS BMT Artha Buana Metro bukan hanya sekedar menjalankan usaha saja, melainkan juga pemberdayaan, pengedukasian, membantu manajemen keuangan anggota melalui simpanan dan juga membantu permodalan kepada UMKM.

Proses usaha yang dilakukan dengan cara jemput bola dan dating *door to door* kepada anggota layanan secara langsung berdampak pada lebih luasnya jangkauan usaha yang dapat dicapai oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial untuk melihat pengaruh aspek modal sosial (Syahli & Sekarningrum, 2017) dalam penerapan inklusi keuangan syariah di pada KSPPS BMT Artha Buana Metro, berikut adalah hal-hal yang ditemukan dalam penelitian terkait modal sosial dalam pelaksanaan inklusi keuangan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Akses merupakan bagian utama yang diperlukan dalam menjalankan inklusi keuangan. Semakin terbukanya akses layanan keuangan diharapkan UMKM akan mendapatkan bantuan modal dengan lebih mudah dan dapat digunakan dalam memberdayakan usahanya. Dengan pola layanan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro yang terjun secara langsung dan tanpa sekat UMKM dapat secara langsung mengkasas layanan keuangan dengan mudah, pola marketing yang dilakukan dapat memberikan informasi secara akurat dan transparan tentang produk layanan yang tersedia pada KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Anggota layanan atau UMKM yang telah mendapat akses informasi dan kemudahan akses layanan keuangan juga perlu mengetahui tentang produk yang yang diberikan oleh KSPPS BMT yang akan diambil oleh oleh UMKM. Peningkatan akses ini juga harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan tentang literasi keuangan, sehingga UMKM atau maupun masyarakat secara umum dalam memanfaatkan layanan keuangan juga diimbangi dengan pengetahuan dari produk dari KSPPS BMT tersebut. Salah satu cara untuk mendukung peningkatan literasi keuangan dilakukan pada saat karyawan dari KPSSP BMT melakukan jemput bola. Petugas akan memberikan promosi dan informasi program serta produk-produk yang dimiliki oleh KSPPS BMT. Edukasi layanan keuangan berikut informasi yang diberikan merupakan hal yang penting agar anggota layanan dapat menggunakan layanan keuangan dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh KPPS BMT Artha Buana Mentro karena mereka mempunyai sistem jemput bola atau terjun langsung, sehingga mereka dapat mendatangi dan menyampaikan informasi secara langsung kepada calon anggota layanan.

Produk yang dimiliki oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro memiliki produk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM sehingga dapat menarik minat dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Selain itu pola kerja jemput bola memberikan pelayanan yang memudahkan bagi pelaku UMKM, pelaku UMKM tidak perlu dating ke kantor, melainkan pihak dari BMT yang dating ke pihak UMKM. Beberapa hal yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM antara lain:

### ***Kemudahan Persyaratan***

Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh masyarakat dan UMKM ketika ingin menjadi anggota layanan dari KSPPS BMT Artha Buana Metro, baik untuk melakukan simpanan

maupun mengajukan pembiayaannya baik yang bersifat konsumtif maupun produktif telah diberikan kemudahan. Kemudahan tersebut berupa sistem jemput bola yang memudahkan anggota layanan dalam bertransaksi sehingga tidak perlu datang ke kantor, serta kemudahan dalam pengajuan persyaratan kredit maupun agunan. Agunan tergantung dari nilai pinjaman yang diajukan.

#### ***Kecepatan Pencairan***

Setelah anggota layanan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan, pihak KSPPS BMT Artha Buana Metro melakukan survey tentang kelayakan usaha, penggunaan pembiayaan dalam rangka menentukan akad pembiayaan agar sesuai dengan akad-akad syariah, penilaian terhadap kemampuan bayar dan karakter anggota, selanjutnya dikomitekan dengan pimpinan agar proses pengajuan pembiayaan dapat dengan cepat dicairkan, terhitung 3 hari sejak dari tanggal pengajuan.

#### ***Fleksibilitas Pelunasan***

KSPPS BMT Artha Buana Metro telah memberikan banyak kemudahan untuk membantu masyarakat dan UMKM dalam memperoleh layanan keuangan, selain dalam hal pembiayaan juga pada saat melakukan pelunasan. KSPPS BMT Artha Buana Metro terkadang memberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran dengan cara melakukan komunikasi dengan petugas dan menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Pelunasan angsuran juga dapat dilakukan setiap hari sehingga tidak memberatkan anggota layanan karena mereka rata-rata menggunakan sistem potong simpanan, artinya petugas KSPPS BMT Artha Buana Metro setiap hari mendatangi anggota layanan dengan menarik simpanan dan memotong angsuran pada saat jatuh tempo. Suatu saat ketika mereka membutuhkan maka akan dikurangkan dari tabungan yang mereka punya, sehingga dengan menggunakan sistem menabung anggota layanan seperti UMKM akan lebih ringan dalam pelunasannya. Model permodalan yang dilakukan oleh UMKM, selain dengan melakukan pinjaman yaitu dengan menabung, karena dengan menabung akan terasa lebih ringan dilakukan daripada harus mengangsur setiap bulan dalam jumlah yang besar. KSPPS BMT Artha Buana Metro telah memudahkan UMKM dalam memilih pendanaan yang disanggupinya. Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro dengan harapan masyarakat dapat terbantu perekonomiannya, karena yang sebelumnya tidak dapat menjangkau layanan keuangan perbankan sekarang mampu mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya.

#### ***Pelatihan dan Pengawasan***

UMKM tentu berharap agar usahanya terus berkembang dan maju, dapat berkarya secara efektif, mandiri dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lain. KSPPS BMT Artha Buana Metro dengan adanya inklusi keuangan dan modal sosial diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut. UMKM yang sebelumnya tidak dapat menjangkau layanan keuangan secara mudah dari perbankan sekarang mampu menjangkau layanan keuangan yang disediakan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro untuk keperluan usahanya.

Pengawasan dan pelatihan dari KSPPS BMT Artha Buana Metro dirasa perlu dalam menjalankan pemberdayaan UMKM yang telah menjadi anggotanya. KSPPS BMT Artha Buana Metro dalam praktiknya telah melakukan pengawasan, namun dalam memberikan pelatihan masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Pelatihan sebenarnya merupakan hal yang penting, setelah mendapatkan permodalan, anggota layanan atau pelaku UMKM perlu diberikan pelatihan. Pelatihan dapat berupa pendampingan usaha maupun sosialisasi pengelolaan keuangan, sehingga setelah mendapatkan pendanaan dan pelatihan UMKM dapat memanfaatkan wawasan yang diperoleh untuk membantu meningkatkan kinerja usahanya.

Dilihat dari tingkat kelancaran yang tercermin dalam laporan NPF (NonPerforming Loan) pada KSPPS BMT Artha Buana Metro pada kurun waktu awal berdiri sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2. Laporan NPF pada KSPPS BMT Artha Buana**

No	Tahun	Presentase
1	2020	2,48%
2	2021	2,56%
3	2022	2,5%

Dapat dilihat dan Analisa bahwa, kemampuan masyarakat dan UMKM dalam membayar pembiayaan yang telah di salurkan KSPPS BMT Artha Buana Metro cukup baik, hal ini juga merupakan indikasi keberlanjutan usaha dari UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro juga tidak kalah penting. KSPPS BMT Artha Buana Metro perlu mengawasi penggunaan dana yang telah disalurkan kepada UMKM agar digunakan dengan baik sehingga usahanya dapat terus berkembang. Oleh karena itu pelatihan dan pengawasan merupakan hal yang penting dan dalam menjalankannya diperlukan strategi yang tepat agar dapat memberdayakan UMKM. Pendanaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro, sedikit banyak dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan UMKM. Dengan adanya pelatihan dan pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro kepada pelaku UMKM ini, akan berdampak pada keberlanjutan usaha UMKM itu sendiri, dimana pengawasan itu dilakukan mulai dari dari proses pengajuan sampai berjalannya pembiayaan dengan mendatangi setiap hari kepada pelaku UMKM itu sendiri.

Penelitian ini hanya terbatas pada program inklusi keuangan bagi pemberdayaan UMKM di KSPPS BMT Artha Buana Metro. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti program inklusi keuangan pada semua anggota layanan pada lembaga keuangan mikro syariah secara menyeluruh. Bagi KSPPS BMT Artha Buana Metro diharapkan dapat menjalankan program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan atau pendampingan kepada anggota layanan baik berupa pelatihan kewirausahaan, keterampilan maupun pelatihan pengelolaan keuangan. Ha ini bertujuan, selain mendapatkan permodalan, anggota layanan juga memiliki tambahan wawasan dalam mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, KSPPS BMT Artha Buana Metro telah melaksanakan program inklusi keuangan syariah dengan baik, dan juga melakukan sosialisasi literasi keuangan. Namun daam hal ini penggunaan insklusi keuangan belum berjalan maksimal, terutama dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada anggota layanan. Praktik dari program inklusi keuangan syariah dengan menggunakan modal sosial tercermin dari program-program inklusi keuangan yang telah dilaksanakan. Akses terhadap layanan keuangan syariah yang disediakan oleh KSPPS BMT Artha Buana Metro melalui produk layanan cukup berkontribusi dalam memberikan permodalan bagi mayarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Program inklusi keuangan syariah, mampu memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjangkau layanan keuangan. Selain mendapatkan permodalan, UMKM juga diberikan kemudahan dalam melakukan angsuran melalui produk sistem potong simpanan serta kelonggaran waktu ketika terjadi hambatan yang dialami oleh pihak UMKM.

## **REFERENSI**

- Agung Budi, M. M., Reni Anggraeni. (2022). Inklusi keuangan pada UMKM di kota Tangerang. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt.v19i4.11845>
- Devi, A., Tanjung, H., & Riswantio, A. (2021). Dampak Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Kesehatan dan Pendidikan Nasional. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 1-26. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.518>

- Iko Putri Yanti, W. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95-112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20-30. <https://doi.org/10.3102/0013189x013005020>
- Nengsih, N. (2023). Strategi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.31958/alittifaq.v3i1.9164>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1). <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 242-262. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.15>
- Siti, M., Gusti Ayu, P., & Ni Kadek, S. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi, dan Penggunaan Dana Bpum terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 11-22. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i01.58719>
- Sugiyono. (2009). *Metodologo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahli, R., & Sekarningrum, B. (2017). Pengelolaan Sampah Berbasis Modal Sosial Masyarakat. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13309>

---

**Copyright Holder :**

© Ahmad Muslimin, et al., (2021)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA